

Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dalam Mengatasi Ketimpangan dan Ketidakstabilan Ekonomi

Hotnayanti Haloho¹, Rizka Nabilah Daulay², Yazid Aditya Sitorus³, Akmal

Huda Nasution⁴, Chairunnisa Zakina Adibra⁵

Universitas Negeri Medan

[email : hotnayantihaloho@gmail.com](mailto:hotnayantihaloho@gmail.com), rizkanabilah12e@gmail.com,

yazidaditya67@gmail.com, akmalhudaNST@unimed.ac.id, nisazakina@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of macroeconomic policies in addressing income inequality and economic instability through a systematic literature review (SLR) approach. Income inequality and economic instability are major structural problems still faced by many developing countries, including Indonesia, despite relatively positive economic growth trends. The literature selection process followed the PRISMA protocol, reviewing 10 indexed scientific journals published between 2020 and 2025, selected based on topic relevance, publication quality, and the availability of active DOIs. The results show that fiscal policy plays a crucial role in income redistribution through targeted capital expenditures and social assistance, while monetary policy maintains price stability and the financial system. Structural policies, on the other hand, contribute to improving the quality of human resources and promoting financial inclusion. However, the effectiveness of macroeconomic policies depends heavily on their design, implementation, and inter-institutional coordination. Inappropriate policies can exacerbate inequality and increase economic instability. The implications of this study suggest that the government needs to design more integrated and inclusive policies to ensure equitable economic growth. A limitation of this study lies in the use of the SLR method without direct empirical analysis of primary data. Therefore, further research is recommended using a quantitative or mixed methods approach to obtain more comprehensive and generalizable results.

Keyword: *Macroeconomic Policy; Income Inequality; Economic Stability; Fiscal Policy; Monetary Policy*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan makroekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis (SLR). Ketidaksetaraan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi merupakan masalah struktural utama yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun tren pertumbuhan ekonomi relatif positif. Proses pemilihan literatur mengikuti protokol PRISMA, dengan meninjau 10 jurnal ilmiah terindeks yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025, yang dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan

ketersediaan DOI aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan melalui belanja modal yang ditargetkan dan bantuan sosial, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Kebijakan struktural, di sisi lain, berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inklusi keuangan. Namun, efektivitas kebijakan makroekonomi sangat bergantung pada desain, implementasi, dan koordinasi antarlembaga. Kebijakan yang tidak tepat dapat memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. Implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan inklusif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode SLR tanpa analisis empiris langsung terhadap data primer. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

Kata kunci: Kebijakan Makroekonomi; Ketidaksetaraan Pendapatan; Stabilitas Ekonomi; Kebijakan Fiskal; Kebijakan Moneter

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Kenaikan *gross domestic product* (GDP) biasanya dinilai sebagai indikator bahwa perekonomian sedang berkembang. Namun, dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peristiwa ini sering ditemukan di negara berkembang, di mana peningkatan output ekonomi justru diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat serta potensi ketidakstabilan ekonomi. Hal keberhasilan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana hasil pembangunan dapat didistribusikan secara merata sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (Sari & Santoso, 2025).

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan ekonomi yang bersifat struktural dan terjadi secara repetitif dalam suatu perekonomian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah sosial, yang tercermin dalam peningkatan kemiskinan relatif, ketimpangan akses terhadap pendidikan, serta keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan. Tingkat ketidakmerataan yang tinggi mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata antar kelompok masyarakat, di mana sebagian kecil kelompok menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar lainnya memiliki akses yang terbatas. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena menurunkan efisiensi alokasi sumber daya, menghambat pengembangan potensi sumber daya manusia, serta melemahkan daya beli masyarakat secara keseluruhan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi dan aktivitas ekonomi (Handayani & Hanifa, 2024).

Dalam Indonesia, konteks ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan yang serius. Walaupun pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan indikasi positif, kesenjangan pendapatan antar wilayah maupun antar individu tetap tergolong tinggi.

Pertumbuhan ekonomi selama periode 2012-2023 belum mampu secara signifikan menekan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Selain itu, berbagai studi mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penurunan ketimpangan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Sari & Santoso, 2025).

Selain masalah ketimpangan, stabilitas ekonomi merupakan tantangan krusial dalam pembangunan karena fluktuasi inflasi, ketidakpastian nilai tukar, serta kebijakan fiskal dan moneter yang tidak selaras dapat menurunkan kepercayaan pasar. Kondisi yang tidak menentu ini berisiko menghambat investasi dan mengganggu tren pertumbuhan jangka panjang, mengingat stabilitas keuangan dan kendali inflasi adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Hudaya, 2023). Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, kebijakan makroekonomi menjadi faktor kunci sebagai instrumen utama dalam mengelola perekonomian. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup sektor fiskal, moneter, dan struktural yang memiliki fungsi berbeda namun bersifat komplementer satu sama lain. Melalui belanja pemerintah dan pajak, kebijakan fiskal berperan dalam mendistribusikan kembali pendapatan, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada upaya menjaga kestabilan harga serta pengendalian inflasi. Sementara itu, fokus utama kebijakan struktural terletak pada peningkatan efisiensi ekonomi dan perbaikan mutu sumber daya manusia (Ghifara et al., 2022).

Akan tetapi, efektivitas kebijakan makroekonomi dalam mengatasi ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi tidak selalu berjalan secara efektif. Ketidaktepatan target dalam belanja publik tidak hanya gagal menurunkan tingkat kesenjangan, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan fiskal tanpa kontribusi redistribusi yang nyata (Yasni & Yulianto, 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa keberhasilan kebijakan makroekonomi sejatinya merupakan hasil dari perancangan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta kesesuaian dengan kondisi ekonomi yang ada. Di sisi lain, dinamika globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi turut menciptakan tantangan baru bagi efektivitas kebijakan makroekonomi. Fenomena otomatisasi serta perkembangan teknologi digital cenderung memicu ketimpangan di pasar tenaga kerja, di mana keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pekerja berketerampilan tinggi, sementara mereka yang berketerampilan rendah justru terancam pengangguran struktural yang memperlebar jurang kesenjangan (Acemoglu & Restrepo, 2020). Realitas ini menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun juga menitikberatkan pada aspek pemerataan serta stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

Tingginya angka pengangguran terbukti secara signifikan memperburuk ketimpangan sekaligus mengganggu stabilitas ekonomi pada saat yang bersamaan. Namun, di sisi lain, peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat berfungsi sebagai menghubungkan faktor utama yang pertumbuhan ekonomi dengan upaya penurunan kesenjangan (Afiatno, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sekadar instrumen pendukung, melainkan harus diintegrasikan secara utuh ke dalam strategi makroekonomi yang komprehensif.

Pemaparan di atas mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan terkait mekanisme sinkronisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam menanggulangi ketimpangan sekaligus ketidakstabilan ekonomi secara simultan. Urgensi ini muncul karena mayoritas studi terdahulu cenderung membedah masing-masing instrumen

kebijakan secara parsial, sehingga keterhubungan strategis antar kebijakan tersebut belum terpetakan secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kinerja kebijakan makroekonomi dalam menangani ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi, sekaligus memberikan rujukan bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) untuk mengkaji kinerja kebijakan makroekonomi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai keterkaitan antar faktor berdasarkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, sekaligus mengurangi potensi bias dalam pemilihan sumber dibandingkan dengan *narrative review* konvensional. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi pola, persamaan, serta perbedaan hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam konteks ketimpangan dan stabilitas ekonomi (Ghifara et al., 2022).

Aturan Pencarian dan Seleksi Literatur

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data elektronik, termasuk Google Scholar, SINTA (*Science and Technology Index*), dan Crossref. Kata kunci yang digunakan merupakan kombinasi dari: “kebijakan makroekonomi”, “ketimpangan ekonomi”, “pendapatan”, “stabilitas “kebijakan fiskal”, “kebijakan moneter”, dan “pertumbuhan inklusif”, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Proses seleksi artikel mengikuti panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi dan reproduktibilitas dalam pelaksanaan review.

Sumber data penelitian ini berasal dari 10 jurnal ilmiah terindeks yang relevan dengan topik dan telah diterbitkan pada periode 2020-2025. Pemilihan jurnal dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria: (1) kesesuaian topik dengan variabel penelitian; (2) kualitas publikasi yang dibuktikan melalui pengindeksan di basis data bereputasi; (3) ketersediaan DOI aktif yang dapat diverifikasi; dan (4) relevansi dengan konteks negara berkembang, khususnya Indonesia. Jurnal yang dipilih mencakup kajian mengenai kebijakan makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, stabilitas ekonomi, akses layanan keuangan, serta transformasi struktur ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai jurnal ilmiah yang dipilih sebagai referensi penelitian. Setiap jurnal dianalisis berdasarkan fokus penelitian, metode yang diterapkan, serta temuan utama yang relevan dengan topik. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin validitas dan relevansi data yang digunakan (Hudaya, 2023).

Sedangkan analisis data memanfaatkan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan sintesis tematik (*thematic synthesis*). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis temuan-temuan dari penelitian terdahulu agar diperoleh kesimpulan yang

komprehensif. Temuan dari berbagai artikel dikelompokkan ke dalam tiga tema utama sesuai dimensi kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan di berbagai konteks ekonomi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan kebijakan makroekonomi dalam menangani ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi (Limoa & Weku, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bagian ini menjelaskan hasil kajian sistematis terhadap 10 artikel ilmiah yang telah memenuhi seluruh kriteria dalam penelitian ini. Hasil kajian disajikan dalam dua bagian utama, pertama, ringkasan mengenai karakteristik serta temuan penting dari masing-masing artikel yang dianalisis. Kedua, pola temuan yang muncul dari berbagai literatur kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek kebijakan makroekonomi. Sistematika penyajian ini dirancang untuk mempermudah identifikasi kaitan antara berbagai instrumen kebijakan dengan pencapaian stabilitas ekonomi.

Karakteristik Artikel yang Dikaji

Dari 47 artikel yang ditemukan pada tahap pencarian awal, dilakukan proses penyaringan menggunakan protokol PRISMA sehingga terpilih 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi. Seluruh artikel tersebut diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2020–2025, menggunakan pendekatan kuantitatif maupun model teoritis-empiris, serta memiliki DOI aktif yang dapat diverifikasi. Sebagian besar penelitian berfokus pada konteks Indonesia, sedangkan dua artikel lainnya merupakan penelitian berskala internasional yang memberikan sudut pandang komparatif terhadap topik yang dibahas. Kombinasi studi kasus nasional dan internasional tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas kebijakan makroekonomi dalam berbagai skala wilayah. Ringkasan karakteristik dan temuan kunci setiap artikel disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik dan Temuan Kunci Artikel yang Dikaji

No.	Penulis & Tahun	Metode	Variabel Utama	Temuan Kunci
1	(Sari & Santoso, 2025)	Regresi Panel	Pertumbuhan ekonomi, Gini Ratio	Pertumbuhan 2012–2023 tidak signifikan menurunkan ketimpangan di Indonesia
2	(Afiatno, 2025)	Regresi OLS	Pengangguran, produktivitas, kemiskinan	Pengangguran memperburuk stabilitas; produktivitas menjadi mediator penting
3	(Handayani & Hanifa, 2024)	Analisis Regresi	Ketimpangan, pendidikan, kemiskinan	Ketimpangan tinggi menghambat pertumbuhan; pendidikan mereduksi ketimpangan
4	(Amalia, 2024)	Data Panel	Struktur ekonomi, upah minimum	Transformasi struktural tanpa kebijakan upah adaptif meningkatkan ketimpangan

5	(Dewi et al., 2024)	Analisis Kuantitatif	Stabilitas makro, inklusi keuangan	Inklusi keuangan mendorong pertumbuhan namun tidak otomatis merata
6	(Limoa & Weku, 2024)	Deskriptif-Kuantitatif	Kebijakan fiskal, kesinambungan anggaran	Kesinambungan fiskal menjadi fondasi stabilitas jangka panjang
7	(Ghifara et al., 2022)	Regresi Panel	Belanja pemerintah, IPM, ketimpangan	IPM signifikan menurunkan ketimpangan; belanja agregat tidak selalu efektif
8	(Hudaya, 2023)	Analisis Kebijakan Moneter	Stabilitas keuangan, inflasi	Stabilitas keuangan merupakan prasyarat pertumbuhan berkelanjutan
9	(Yasni & Yulianto, 2020)	Regresi Berganda	Belanja modal, bantuan sosial	Belanja modal dan bansos efektif menurunkan ketimpangan bila tepat sasaran
10	(Acemoglu & Restrepo, 2020)	Model Teoritis-Empiris	Otomasi, tenaga kerja, ketimpangan	Otomasi menciptakan polarisasi pasar kerja yang memperburuk ketimpangan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)

Pola Temuan Perdimensi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap seluruh artikel yang dikaji, ditemukan pola temuan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama. Tabel 2 menyajikan perbandingan temuan efektif dan kondisional dari setiap dimensi kebijakan.

Tabel 2. Perbandingan Temuan per Dimensi Kebijakan Makroekonomi

Dimensi Kebijakan	Temuan Positif / Efektif	Temuan Negatif / Kondisional
Kebijakan Fiskal	Belanja modal dan bantuan sosial yang tepat sasaran terbukti efektif mereduksi ketimpangan (Yasni & Yulianto, 2020)	Belanja agregat tanpa ketepatan sasaran tidak menurunkan ketimpangan; kebijakan upah yang tidak adaptif antardaerah menciptakan kesenjangan baru (Ghifara et al., 2022; Amalia, 2024)
Kebijakan Moneter	Stabilitas keuangan mendukung pertumbuhan; inklusi keuangan memperluas partisipasi kelompok rentan (Hudaya, 2023; Dewi et al., 2024)	Manfaat inklusi keuangan tidak otomatis merata; kebijakan moneter kontraktif berlebihan menekan pertumbuhan (Dewi et al., 2024)
Kebijakan Struktural	Peningkatan IPM secara signifikan menurunkan ketimpangan; investasi SDM bersifat redistributif jangka panjang (Ghifara et al., 2022)	Otomasi tanpa kebijakan <i>reskilling</i> menciptakan polarisasi pasar kerja; transformasi struktural tanpa kebijakan adaptif memperburuk ketimpangan

		(Acemoglu & Restrepo, 2020; Amalia, 2024)
Pertumbuhan– Ketimpangan	Peningkatan produktivitas tenaga kerja terbukti menjadi mediator penurunan ketimpangan (Afiatno, 2025)	<i>Trickle-down effect</i> tidak bekerja otomatis; ketimpangan tinggi menghambat pertumbuhan melalui penurunan permintaan agregat (Sari & Santoso, 2025; Handayani & Hanifa, 2024)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)

Temuan Utama Lintas Literatur

Secara keseluruhan, kajian terhadap 10 artikel menghasilkan empat temuan utama yang konsisten. Pertama, efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan tidak selalu terjadi secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada etepatan sasaran kebijakan serta keberlanjutan pengelolaan anggaran negara. Apabila belanja pemerintah dilakukan secara tepat sasaran dan dikelola secara konsisten, maka kebijakan tersebut dapat berperan dalam memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat (Yasni & Yulianto; Ghifara et al.; Limoa & Weku, 2024).

Kedua, stabilitas sistem keuangan menjadi hal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata. Melalui adanya inklusi keuangan, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal dapat mulai memanfaatkannya. Namun demikian, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, tetap diperlukan kebijakan pendukung yang dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan tersebut secara optimal (Hudaya; Dewi et al., 2024).

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki hubungan dengan penurunan tingkat ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat dapat menjadi upaya jangka panjang yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti otomasi juga dapat menimbulkan masalah baru apabila tidak diimbangi dengan program peningkatan keterampilan atau pelatihan ulang bagi tenaga kerja (Ghifara et al.; Acemoglu & Restrepo, 2020).

Keempat, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Jika tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat, kondisi ketimpangan yang tinggi justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari tidak selalu terjadinya efek *trickle-down* di Indonesia selama periode 2012–2023. Bahkan, ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan permintaan masyarakat serta membatasi akses pendidikan bagi kelompok berpenghasilan rendah (Sari & Santoso; Handayani & Hanifa; Afiatno, 2025).

PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara lebih mendalam implikasi serta hubungan antar temuan yang telah dipaparkan pada bagian hasil. Pembahasan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat tema utama. Setiap tema dianalisis dengan mempertimbangkan konteks kebijakan makroekonomi di Indonesia serta kaitannya dengan upaya perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

Efektivitas Kebijakan Fiskal: Antara Besaran dan Ketepatan Sasaran Belanja Modal dan Bantuan Sosial

Hasil kajian literatur ini kembali menegaskan bahwa dalam kebijakan fiskal yang bersifat redistributif, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut dirancang dan disalurkan kepada masyarakat. Penelitian (Yasni & Yulianto, 2020) menunjukkan bahwa belanja modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal serta sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan secara cukup signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena pembangunan tersebut mampu membuka lapangan kerja baru, terutama di wilayah yang sebelumnya kurang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, (Ghifara et al., 2022) juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah belanja pemerintah secara keseluruhan tidak selalu secara langsung menurunkan tingkat ketimpangan. Apabila distribusi belanja tidak merata atau lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah lebih kuat, maka belanja publik justru dapat memperlebar kesenjangan secara tidak langsung. Temuan ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah bahwa perancangan program belanja harus disertai dengan sistem penargetan yang lebih tepat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan data kemiskinan, pemetaan tingkat kerentanan wilayah, serta evaluasi berkala terhadap distribusi manfaat dari setiap program yang dijalankan.

Kesinambungan Fiskal sebagai Fondasi Jangka Panjang

(Limoa & Weku, 2024) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Defisit anggaran yang terlalu besar dan berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan dua risiko sekaligus. Di satu sisi, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas makroekonomi, sementara di sisi lain dapat mengurangi kemampuan fiskal pemerintah dalam jangka panjang untuk membiayai berbagai program sosial yang sebenarnya dibutuhkan guna mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat kebijakan redistributif, tetapi justru sebagai syarat penting agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara terus-menerus.

(Amalia, 2024) juga menyoroti pentingnya memahami kompleksitas kebijakan upah minimum dalam proses perubahan struktur ekonomi. Kebijakan penetapan upah yang tidak mempertimbangkan perbedaan tingkat produktivitas antar daerah dapat berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Karena itu, perancangan kebijakan fiskal yang efektif seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Kebijakan yang dibuat perlu lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi lokal, bukan menggunakan satu standar yang sama untuk semua wilayah.

Kebijakan Moneter: Stabilitas sebagai Prasyarat, Inklusi sebagai Jembatan

(Hudaya, 2023) menjelaskan bahwa stabilitas sistem keuangan tidak hanya menjadi tujuan dari kebijakan moneter, tetapi juga merupakan dasar penting bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Ketika sektor keuangan tidak stabil, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya menghambat investasi produktif. Dampaknya juga dapat dirasakan pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang

banyak menyerap tenaga kerja dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, menjaga stabilitas sistem keuangan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan yang secara tidak langsung mendukung upaya pengurangan kemiskinan karena dampaknya yang cukup besar terhadap perekonomian.

(Dewi et al., 2024) kemudian memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang didukung oleh stabilitas makroekonomi yang kuat dapat menjadi sarana penting untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Ketika masyarakat berpendapatan rendah memiliki akses terhadap layanan seperti tabungan, kredit, maupun instrumen investasi sederhana, mereka memiliki peluang untuk membangun aset yang produktif. Aset tersebut dapat membantu mereka menghadapi guncangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Namun demikian, penerapan inklusi keuangan juga memiliki tantangan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai serta perlindungan konsumen yang kuat. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat yang rentan justru berpotensi terjebak dalam masalah utang. Oleh karena itu, kebijakan inklusi keuangan sebaiknya tidak diterapkan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari kebijakan yang lebih menyeluruh, seperti melalui program edukasi keuangan, pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro, serta regulasi perlindungan konsumen yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Kebijakan Struktural: Investasi Manusia dan Adaptasi Teknologi

Hasil kajian (Ghifara et al., 2022) yang menunjukkan pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan memiliki implikasi yang cukup luas. Investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dari sisi sosial, tetapi juga merupakan langkah ekonomi yang efektif untuk jangka panjang. Berbeda dengan bantuan atau transfer fiskal langsung yang dampaknya biasanya hanya sementara, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membawa perubahan yang lebih mendasar pada kemampuan produktif masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM dapat memberikan dampak pengurangan ketimpangan yang lebih berkelanjutan bahkan hingga lintas generasi.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, (Acemoglu & Restrepo, 2020) juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak negatif dari otomasi. Apabila perkembangan teknologi tidak diikuti dengan kebijakan yang tepat, maka kondisi tersebut dapat memperbesar ketimpangan. Otomasi berpotensi menggantikan pekerjaan pada tingkat menengah sehingga menimbulkan polarisasi di pasar tenaga kerja. Situasi ini dapat membentuk pola distribusi pendapatan yang menyerupai jam pasir, di mana kelompok berpendapatan tinggi terus meningkat sementara kelompok menengah justru semakin tertekan dan berisiko turun ke kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, program peningkatan keterampilan atau pelatihan ulang tenaga kerja yang terencana dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat menjadi langkah kebijakan yang sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Hubungan Timbal Balik: Mematahkan Perangkap Ketimpangan

Hasil penelitian (Sari & Santoso, 2025) yang menunjukkan bahwa *trickle-down effect* tidak terjadi secara otomatis di Indonesia selama periode 2012–2023 memberikan gambaran penting bagi cara pandang dalam kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak

selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Jika pertumbuhan tersebut tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka dapat muncul kondisi yang disebut sebagai perangkap ketimpangan (*inequality trap*), yaitu situasi ketika kesenjangan menjadi sulit dikurangi tanpa adanya kebijakan yang dirancang secara khusus dan terarah. (Handayani & Hanifa, 2024) juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sehingga membentuk siklus yang saling memengaruhi dan menyulitkan proses pembangunan.

(Afiatno, 2025) menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting yang menghubungkan kebijakan makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan. Kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja—misalnya melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, serta perbaikan kebijakan di pasar tenaga kerja—dapat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang berfokus pada peningkatan produktivitas perlu menjadi bagian penting dari strategi kebijakan makroekonomi dalam jangka panjang.

Sintesis: Bauran Kebijakan yang Inklusif dan Terkoordinasi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kebijakan saja yang mampu secara langsung mengatasi ketimpangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Upaya untuk menangani kedua masalah tersebut membutuhkan kombinasi berbagai kebijakan yang saling mendukung. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan makroekonomi hanya dapat tercapai apabila terdapat perpaduan kebijakan (*policy mix*) yang terintegrasi dan saling terkoordinasi, baik dari sisi kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan struktural. Tabel 3 menyajikan kerangka sintesis *policy mix* inklusif yang dirumuskan berdasarkan seluruh temuan literatur yang dikaji.

Tabel 3. Sintesis Bauran Kebijakan Makroekonomi Inklusif

Komponen Policy Mix	Peran terhadap Ketimpangan	Peran terhadap Stabilitas	Kondisi Efektivitas
Kebijakan Fiskal	Redistribusi langsung melalui belanja modal, bansos, dan upah minimum yang tepat sasaran	Kesinambungan fiskal menjaga stabilitas makro dan kepercayaan pasar	Tepat sasaran, adaptif antardaerah, defisit terkendali
Kebijakan Moneter	Pengendalian inflasi melindungi daya beli; inklusi keuangan memperluas akses kelompok rentan	Stabilitas harga dan sistem keuangan sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan	Keseimbangan kontraksi-ekspansi; literasi keuangan sebagai pendampingan
Kebijakan Struktural	Investasi SDM (IPM) dan <i>reskilling</i> sebagai redistribusi jangka panjang	Peningkatan produktivitas mendukung pertumbuhan berkeadilan yang stabil	Konsistensi investasi SDM jangka panjang dan adaptasi teknologi proaktif
Kebijakan Ketenagakerjaan	Pengurangan pengangguran struktural sebagai	Produktivitas tenaga kerja menstabilkan	Koordinasi dengan kebijakan fiskal dan

mediator ketimpangan	penurunan	permintaan agregat dan output	struktural; program berkelanjutan
-------------------------	-----------	----------------------------------	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)

Koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjalankan bauran kebijakan tersebut. Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengelola kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perlu membangun komunikasi yang kuat dan jelas agar kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, hal tersebut perlu disampaikan dan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia agar dampaknya terhadap likuiditas dan inflasi dapat diantisipasi sejak awal. Sebaliknya, kebijakan penetapan suku bunga juga perlu mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah agar tidak menambah beban bunga utang yang pada akhirnya dapat mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan program sosial. Dengan adanya koordinasi yang baik serta komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, kebijakan makroekonomi dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan dan menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan makroekonomi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi melalui metode *systematic literature review* terhadap 10 artikel ilmiah terindeks yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Dari hasil kajian tersebut, terdapat empat kesimpulan utama yang dapat diambil.

Pertama, kebijakan fiskal yang diarahkan secara tepat, khususnya melalui belanja modal dan program bantuan sosial, terbukti mampu membantu mengurangi ketimpangan pendapatan apabila didukung oleh sistem penyaluran yang efektif serta pengelolaan fiskal yang berkelanjutan (Yasni & Yulianto; Ghifara et al.; Limoa & Weku, 2024).

Kedua, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta kestabilan sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan yang didukung oleh kondisi makroekonomi yang stabil dapat memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang rentan, meskipun tetap memerlukan kebijakan pendukung agar dapat berjalan secara optimal (Hudaya; Dewi et al., 2024).

Ketiga, kebijakan struktural yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan program peningkatan keterampilan atau *reskilling*, menjadi salah satu upaya jangka panjang yang berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan. Kebijakan ini juga penting sebagai respons terhadap perubahan di pasar tenaga kerja akibat perkembangan teknologi dan otomasi (Ghifara et al.; Acemoglu & Restrepo; Amalia, 2024).

Keempat, konsep *trickle-down effect* tidak terbukti terjadi secara otomatis. Bahkan, tingkat ketimpangan yang tinggi justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu (*growth-first*) tidak selalu efektif dalam jangka panjang (Sari & Santoso; Handayani & Hanifa; Afiatno, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). *Automation and rent dissipation: Implication for wages, inequality, and productivity*. *Journal of Economic*. 1-56.
- Afiatno, B. E. (2025). Pengaruh pengangguran, produktivitas, dan kemiskinan terhadap ketimpangan dan stabilitas ekonomi. *Independent Journal of Economics*, 5(2), 161-173.
- Amalia, A. M. (2024). Dampak perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jambura Economic Education Journal*, 6(1), 616-628.
- Dewi, D. R., et al. (2024). *Macroeconomic stability, financial inclusion and growth*. *Randwick International of Humanities*, 4(6), 397–410.
- Ghifara, A. S., Wardhana, A. K., Iman, A. N., Rusgianto, S., & Ratnasari, R. T. (2022). *The effect of economic growth, government spending, and human development index toward inequality of income distribution in Indonesia*. *Daengku Journal*, 2(4), 529-536.
- Handayani, N., & Hanifa, N. (2024). Pengaruh ketimpangan pendapatan, pendidikan, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 4(1), 112–124.
- Hudaya, A. (2023). *Financial stability in Indonesian monetary policy analysis*. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 1-17.
- Limoa, W. S., & Weku, C. E. F. (2024). *Sustaining prosperity: Exploring fiscal and financial sustainability in the context of dynamic fiscal policy*. *Advances in Management & Financial Reporting*, 2(2), 85–97.
- Sari, P. H., & Santoso, R. P. (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012–2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 220–226.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran belanja modal dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan. *Substansi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 39-63.